

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan, dan Kepemimpinan”** ini dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dan untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan peran kepemimpinan dalam pembangunan nasional.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar makalah ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber referensi yang berguna bagi pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan	2
BAB II. PEMBAHASAN	3
A. Pertumbuhan Ekonomi.....	3
B. Pendapatan	4
C. Kepemimpinan	6
D. Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan	8
E. Peran Kepemimpinan dalam Pertumbuhan Ekonomi	9
F. Tantangan dalam Integrasi Ketiga Unsur.....	11
BAB III. PENUTUP	13
A. KESIMPULAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara. Ekonomi yang tumbuh menunjukkan bahwa kapasitas produksi nasional meningkat, lapangan kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat cenderung naik. Namun, realitas di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam konteks inilah penting untuk memahami bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional, melainkan harus dilihat bersama dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan adanya kepemimpinan yang efektif.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% pada tahun 2023. Meski angka ini menunjukkan stabilitas, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antarwilayah, serta ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat (BPS, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif menyebabkan sebagian besar manfaat pembangunan hanya dirasakan oleh kelompok atas, sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah tetap tertinggal.

Pendapatan masyarakat merupakan komponen penting dalam mengukur dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kehidupan individu. Pendapatan yang layak memungkinkan masyarakat untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Gini ratio Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,388, yang menunjukkan bahwa kesenjangan masih cukup tinggi dan belum mengalami perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Dalam konteks ini, peran kepemimpinan menjadi sangat vital. Kepemimpinan yang kuat dan visioner mampu mengarahkan kebijakan ekonomi untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin di tingkat nasional maupun daerah memiliki peran strategis dalam menyusun program-program pembangunan

yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial.

Kepemimpinan yang lemah dapat menyebabkan salah arah kebijakan, praktik korupsi, serta lemahnya pengawasan dan implementasi program-program ekonomi. Sebaliknya, kepemimpinan yang akuntabel, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat luas. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan tidak akan optimal tanpa adanya kepemimpinan yang baik sebagai penggerak utama pembangunan.

Dengan melihat dinamika tersebut, penting bagi kita untuk memahami hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kualitas kepemimpinan. Ketiganya merupakan pilar utama dalam menciptakan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adil. Makalah ini akan membahas secara mendalam ketiga aspek tersebut dan relevansinya dalam konteks pembangunan di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud Pertumbuhan Ekonomi
2. Apa yang dimaksud Pendapatan
3. Apa yang dimaksud Kepemimpinan
4. Bagaimana Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan
5. Bagaimana Peran Kepemimpinan dalam Pertumbuhan Ekonomi
6. Apa Tantangan dalam Integrasi Ketiga Unsur

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui Apa yang dimaksud Pertumbuhan Ekonomi
2. Untuk mengetahui Apa yang dimaksud Pendapatan
3. Untuk mengetahui Apa yang dimaksud Kepemimpinan
4. Untuk mengetahui Bagaimana Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan
5. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepemimpinan dalam Pertumbuhan Ekonomi
6. Untuk mengetahui Apa Tantangan dalam Integrasi Ketiga Unsur

BAB II

PEMBAHASAN

A. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output nasional riil yang terjadi secara berkesinambungan dari waktu ke waktu (Sukirno, 2020). Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena terkait langsung dengan bertambahnya barang dan jasa yang tersedia dalam suatu perekonomian.

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tujuan utama dari pertumbuhan ini adalah menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,05% pada tahun 2023. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan (BPS, 2023). Sektor-sektor ini menunjukkan peran penting dalam mendongkrak kinerja ekonomi nasional, terutama dalam masa pemulihan pascapandemi COVID-19.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi bersifat inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Wilayah-wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat jika dibandingkan dengan Jawa atau Sumatera (Kementerian PPN/Bappenas, 2022).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pertumbuhan yang hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan menimbulkan masalah jangka panjang. Oleh karena itu, saat ini berkembang pendekatan *green economy* atau ekonomi hijau, yang berupaya menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Faktor-faktor yang memengaruhipertumbuhanekonomiantara lain:

1. Investasi: Baik investasi asing maupun dalam negeri berperan penting dalam menciptakan infrastruktur dan lapangan kerja.
2. Sumber daya manusia: Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sangat menentukan produktivitas nasional.
3. Stabilitas politik dan hukum: Kepastian hukum dan kepemimpinan yang stabil menjadi fondasi penting dalam menarik investor.
4. Teknologi: Inovasi dan adopsi teknologi mendorong efisiensi dan peningkatan output produksi.
5. Kebijakan fiskal dan moneter: Peran pemerintah dalam menjaga kestabilan inflasi, suku bunga, dan defisit anggaran memengaruhi iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pandangan para ekonom Indonesia, pertumbuhan ekonomi harus dijadikan sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan bermakna jika mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas, menurunkan angka kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan sosial (Suryana, 2021).

Oleh karena itu, strategi pembangunan Indonesia ke depan harus lebih menekankan pada pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Peran kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik sangat menentukan arah dan keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut.

B. PENDAPATAN

Pendapatan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam konteks makroekonomi, pendapatan nasional menunjukkan jumlah total penerimaan yang diterima oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Sedangkan secara mikro, pendapatan individu atau rumah tangga mencerminkan kemampuan ekonomis seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (Sukirno, 2020).

Tingginya pendapatan masyarakat sering diasosiasikan dengan meningkatnya daya beli dan taraf hidup yang lebih baik. Namun, dalam kenyataannya, pendapatan yang tinggi tidak selalu merata dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS), Gini Ratio Indonesia pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,388, angka yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang masih cukup besar (BPS, 2023).

Gini Ratio adalah ukuran ketimpangan yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan atau kekayaan masyarakat menyimpang dari distribusi yang ideal. Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Meskipun telah terjadi sedikit perbaikan dalam satu dekade terakhir, ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama antara wilayah urban dan rural serta antar kawasan barat dan timur Indonesia (Bappenas, 2022).

Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat antara lain:

1. Pendidikan dan keterampilan: Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih besar. Akses pendidikan yang merata sangat penting untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.
2. Lapangan kerja: Ketersediaan pekerjaan formal yang layak dan bergaji memadai berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Struktur ekonomi daerah: Wilayah yang memiliki basis industri, perdagangan, atau pariwisata cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan wilayah agraris tradisional.
4. Akses terhadap sumber daya dan modal: Ketidaksetaraan dalam akses terhadap tanah, modal, usaha, dan teknologi turut memperlebar jurang pendapatan antar kelompok masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja merupakan instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan secara lebih adil serta mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.

Namun demikian, kebijakan peningkatan pendapatan harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Artinya, perlu didorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pembukaan akses pasar bagi UMKM, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput.

Selain itu, kebijakan pajak progresif juga berperan dalam redistribusi pendapatan. Pajak yang lebih besar untuk kelompok berpenghasilan tinggi, dan subsidi untuk kelompok miskin,

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan negara untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan keadilan sosial.

Oleh karena itu, memahami dinamika pendapatan sangat penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Tanpa distribusi pendapatan yang adil, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun akan berisiko memperlebar ketimpangan sosial dan menciptakan instabilitas ekonomi di masa depan.

C. KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan (leadership) merupakan faktor strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan tidak hanya menyangkut jabatan, tetapi mencakup kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, mengorganisasi, serta memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama (Kartono, 2016).

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, kepemimpinan menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan publik, mengelola sumber daya secara efisien, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seorang pemimpin yang visioner, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat mampu membawa kemajuan yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun daerah (Ridwan, 2020).

1. Tipe-Tipe Kepemimpinan

Dalam teori kepemimpinan klasik dan modern, dikenal berbagai tipe kepemimpinan, antara lain:

- Kepemimpinan transformasional, yaitu gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional sangat efektif dalam mendorong perubahan, inovasi, dan reformasi sosial.
- Kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang berfokus pada imbal jasa dan hubungan kerja formal antar pemimpin dan bawahan.
- Kepemimpinan demokratis, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- Kepemimpinan otoriter, di mana pemimpin memegang kendali penuh dan membuat keputusan tanpa partisipasi bawahannya.

Indonesia, sebagai negara demokratis dengan struktur desentralisasi pemerintahan, sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin daerah yang mampu menerapkan kepemimpinan partisipatif dan akuntabel. Dalam hal ini, peran kepala daerah sangat strategis dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjamin pemerataan hasil pembangunan (Kementerian Dalam Negeri, 2023).

2. Kepemimpinan dan Kinerja Ekonomi

Kepemimpinan yang efektif dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Di tingkat nasional, kepemimpinan yang stabil dan pro-rakyat akan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi investor. Di tingkat lokal, kepala daerah yang inovatif mampu mengoptimalkan potensi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Studi yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah yang berbasis pelayanan publik (*public service-oriented leadership*) berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat (LAN RI, 2022). Pemimpin yang terbuka terhadap kritik, berani melakukan terobosan, dan bersih dari korupsi terbukti lebih berhasil dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Tantangan Kepemimpinan di Indonesia

Meskipun penting, kepemimpinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Praktik korupsi dan politik transaksional, yang melemahkan moralitas dan efektivitas kepemimpinan.
- Kurangnya inovasi kebijakan, terutama di daerah-daerah tertinggal yang masih terpaku pada pola kerja birokratis.
- Minimnya partisipasi publik, akibat rendahnya literasi politik dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius dalam pembinaan kepemimpinan nasional dan daerah, baik melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, maupun penguatan sistem pengawasan dan transparansi.

4. Kepemimpinan dalam Perspektif Ekonomi Berkelanjutan

Di era modern, kepemimpinan yang dibutuhkan bukan hanya yang mampu mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga yang mampu memastikan pertumbuhan tersebut berkelanjutan dan inklusif. Kepemimpinan berwawasan lingkungan, sosial, dan keadilan

ekonomi harus menjadi standar baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemimpin harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang.

D. KETERKAITAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan merupakan dua indikator penting yang saling berkaitan dalam mengukur kesejahteraan suatu negara atau daerah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu, sedangkan pendapatan merujuk pada akumulasi hasil ekonomi yang diterima individu atau masyarakat, baik dari sektor formal maupun informal (Sukirno, 2020).

1. Hubungan Langsung antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya berimplikasi pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Ketika ekonomi tumbuh, aktivitas produksi, perdagangan, dan investasi meningkat, sehingga membuka lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan. Dalam konteks makro, Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat menggambarkan naiknya total output nasional, yang dapat menambah pendapatan nasional (Todaro & Smith, 2011; Siregar, 2016).

Sebagai contoh, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, terutama setelah reformasi ekonomi pasca-1998. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan tingkat kemiskinan nasional. Namun, penting dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menjamin pemerataan pendapatan, tergantung pada bagaimana distribusi hasil pertumbuhan tersebut (BPS, 2022).

2. Pertumbuhan Ekonomi tanpa Pemerataan Pendapatan

Meskipun pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan pendapatan secara agregat, tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Ketimpangan pendapatan sering kali muncul ketika hasil dari pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu. Fenomena ini dikenal dengan istilah *growth without equity* (pertumbuhan tanpa pemerataan) (Kuncoro, 2013).

Ketimpangan ini tercermin dari indeks Gini, yang menunjukkan disparitas pendapatan antar penduduk. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami

peningkatan PDB, tetapi tingkat ketimpangan pendapatan tetap tinggi, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, atau antara wilayah barat dan timur Indonesia (BPS, 2023).

3. Faktor yang Mempengaruhi Keterkaitan

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kuat atau lemahnya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan:

- Kualitas pertumbuhan: Pertumbuhan yang inklusif dan menciptakan lapangan kerja akan lebih berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.
- Struktur ekonomi: Ketergantungan pada sektor-sektor padat modal (misalnya pertambangan) cenderung menghasilkan pertumbuhan tinggi, tetapi sedikit menyerap tenaga kerja.
- Kebijakan distribusi: Peran kebijakan pemerintah dalam redistribusi pendapatan melalui pajak, subsidi, dan program perlindungan sosial sangat penting untuk menjembatani kesenjangan.
- Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja: Semakin tinggi pendidikan, semakin besar kemungkinan individu mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih baik dalam sistem ekonomi yang tumbuh.

4. Implikasi bagi Kebijakan Publik

Pemahaman terhadap keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penting untuk perumusan kebijakan yang berkeadilan. Pemerintah perlu menekankan strategi pertumbuhan yang bersifat inklusif, yaitu pertumbuhan yang mendorong partisipasi masyarakat luas dan menjamin pemerataan manfaat. Program pembangunan infrastruktur desa, bantuan sosial, pendidikan vokasi, dan pemberdayaan UMKM adalah langkah konkret untuk menjembatani pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk (Kementerian Keuangan RI, 2021).

E. PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI

Kepemimpinan memainkan peranan yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Kepemimpinan yang visioner, strategis, dan responsif mampu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, membentuk kebijakan publik yang produktif, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah atau tidak akuntabel cenderung menjadi hambatan bagi kemajuan ekonomi.

1. Kepemimpinan dan Kebijakan Ekonomi

Kepemimpinan yang baik tercermin dari kemampuan pemimpin dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Kebijakan yang pro-rakyat, mendukung UMKM, memperluas lapangan kerja, dan mendorong investasi akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, peran pemerintah daerah sebagai pemimpin lokal juga sangat penting dalam menciptakan inovasi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Haris, 2020).

Sebagai contoh, kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur nasional dan digitalisasi pelayanan publik telah berkontribusi pada kemudahan berusaha dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang fokus pada pembangunan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

2. Kepemimpinan Visioner dan Transformasional

Kepemimpinan yang visioner memiliki pandangan jangka panjang dan berani melakukan terobosan. Pemimpin transformasional mendorong perubahan struktural yang berdampak pada efisiensi birokrasi, penurunan korupsi, dan penguatan kapasitas ekonomi daerah. Pemimpin daerah seperti Ridwan Kamil (Jawa Barat) atau Tri Rismaharini (Surabaya) sering dijadikan contoh bagaimana pendekatan kepemimpinan berbasis pelayanan publik dan inovasi digital mampu menggerakkan ekonomi lokal (Widianingsih & Suharto, 2021).

3. Kepemimpinan dalam Membangun Iklim Investasi

Stabilitas kepemimpinan memberikan kepercayaan kepada investor. Investor domestik maupun asing cenderung masuk ke wilayah atau negara yang memiliki kepastian hukum, regulasi yang jelas, dan pemimpin yang mampu menjaga iklim kondusif. Kepemimpinan yang koruptif dan tidak transparan justru akan menciptakan ketidakpastian, meningkatkan biaya ekonomi, dan memperlambat pertumbuhan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).

4. Kepemimpinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pemimpin yang dekat dengan rakyat memahami kebutuhan riil masyarakat. Melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan kemitraan usaha, kepemimpinan yang inklusif dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif (Bappenas, 2020).

5. Tantangan Kepemimpinan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemimpin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain:

- Ketimpangan antarwilayah
- Keterbatasan anggaran pembangunan
- Korupsi dalam pengelolaan anggaran
- Resistensi birokrasi terhadap reformasi
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Untuk itu, kepemimpinan harus adaptif, kolaboratif, dan berbasis data agar mampu menjawab dinamika global dan lokal yang terus berubah.

F. TANTANGAN DALAM INTEGRASI KETIGA UNSUR

Integrasi antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan kepemimpinan yang efektif merupakan sebuah proses yang kompleks. Ketiganya saling berkaitan erat, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan struktural, kelembagaan, dan sosial yang menghambat sinergi yang ideal. Kegagalan dalam mengintegrasikan ketiga unsur ini dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan, stagnasi ekonomi, serta rendahnya kesejahteraan masyarakat secara luas.

1. Ketimpangan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diiringi dengan distribusi pendapatan yang adil. Fenomena ini disebut dengan *growth without equity* (pertumbuhan tanpa pemerataan), di mana keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok elit (Tambunan, 2019). Hal ini dapat memicu ketidakpuasan sosial dan memperlemah legitimasi kepemimpinan.

2. Kepemimpinan yang Belum Inklusif dan Responsif

Kepemimpinan yang tidak inklusif atau kurang partisipatif sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin. Banyak pemimpin lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik daripada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi mikro yang berdampak langsung pada pendapatan rakyat. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menghambat terjadinya integrasi yang efektif (Widodo, 2020).

3. Fragmentasi Kebijakan dan Koordinasi Antar Lembaga

Tantangan lainnya adalah fragmentasi kebijakan antara pusat dan daerah, atau antar instansi pemerintahan. Ketidakharmisan ini menyebabkan tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan lemahnya implementasi kebijakan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan yang baik (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

4. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Merata

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia juga menjadi penghambat utama. Pembangunan ekonomi dan kepemimpinan membutuhkan SDM yang kompeten, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ketimpangan pendidikan dan rendahnya literasi ekonomi di beberapa daerah menyebabkan sebagian besar masyarakat belum bisa menikmati hasil pembangunan secara maksimal (Haryanto, 2018).

5. Korupsi dan Lemahnya Tata Kelola

Korupsi dan praktik maladministrasi masih menjadi masalah serius dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Kepemimpinan yang tidak akuntabel cenderung menggunakan anggaran pembangunan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, program peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan optimal (KPK, 2022).

6. Tantangan Eksternal: Krisis Global dan Perubahan Iklim

Faktor eksternal seperti krisis ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan iklim juga menjadi tantangan yang mengganggu integrasi ketiga unsur. Misalnya, pandemi COVID-19 telah memperlihatkan bagaimana lemahnya sistem perlindungan sosial dan kepemimpinan krisis dapat memperbesar kesenjangan ekonomi (Bank Indonesia, 2021).

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan kepemimpinan merupakan tiga elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan suatu negara, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh bagaimana pendapatan didistribusikan secara merata di tengah masyarakat. Di sisi lain, kepemimpinan yang efektif, inklusif, dan responsif berperan penting dalam mengarahkan proses pembangunan agar hasilnya tidak hanya berdampak makrotetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.

Keterkaitan antar ketiga unsur ini tampak dalam bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan dirancang dan diimplementasikan. Kepemimpinan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan menciptakan sistem distribusi pendapatan yang adil. Sebaliknya, lemahnya kepemimpinan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang timpang dan kesenjangan sosial yang makin melebar.

Tantangan dalam mengintegrasikan ketiga unsur ini sangat kompleks, mulai dari ketimpangan distribusi pendapatan, fragmentasi kebijakan, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, hingga praktik korupsi dan tantangan global. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari semua pihak—pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil—untuk membangun sinergi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan yang berkeadilan, dan kepemimpinan yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). *Rencana aksinasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan perekonomian Indonesia 2020*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Haris, S. (2020). *Kepemimpinan dan tata kelola pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Haryanto, A. (2018). *Pendidikan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Strategi nasional pengentasan kemiskinan ekstrem*. Jakarta: Bappenas.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan tahunan KPK 2021*. Jakarta: KPK RI.
- Tambunan, T. T. H. (2019). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan peluang menuju ekonomi inklusif*. Jakarta: LP3ES.
- Widodo, J. (2020). *Kepemimpinan publik dan good governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widianingsih, I., & Suharto, E. (2021). *Kepemimpinan inovatif dalam tata kelola pemerintah daerah*. Bandung: Unpad Press.